

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) adalah upaya dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dengan mengembalikan demokrasi ke tangan rakyat. Menurut Handoyono, pemilihan umum merupakan sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif, dan sekaligus merupakan salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik (Palupi, 2020). Untuk itu, keterlibatan rakyat secara langsung sangat berperan penting untuk memilih pemimpin dan perwakilannya di parlemen.

Pada tahun 2019, KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang mana kala itu menyelenggarakan pemilu serentak pada 17 April 2019 silam. Pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi bagian dari pemilu serentak pertama di Indonesia. Selain pemilihan presiden dan wakil presiden, diselenggarakan juga pemilihan anggota legislatif yaitu memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur sebagaimana dalam Putusan MK No.14/PUU-IX/2013 dan diakomodasi dalam UU Pemilu tahun 2017 (Rohmah, 2019). Pemilu serentak di sini dimaknai sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan dalam satu pelaksanaan.

Jumlah pemilih pada pemilu 2019 sebanyak 193 juta orang yang mana bertambah sebanyak 2,4 juta orang dari pemilu sebelumnya yaitu tahun 2014.

Pemungutan suara dilaksanakan di 809.500 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan jumlah total calon anggota legislatif sebanyak 245.000 orang yang mana memperebutkan sekitar 20.500 kursi yang ada di 34 provinsi dan sekitar 500 kabupaten/kota (BBC News, 2019). Pemilu 2019 menghasilkan sepasang presiden dan wakil presiden, 575 anggota DPR RI, 136 anggota DPD, 2.207 anggota DPRD Provinsi dan 17.610 anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang turut melaksanakan pemilu serentak tahun 2019 silam. Dalam pemilu anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dibagi menjadi 7 daerah pemilihan atau dapil, yaitu:

1. Dapil Kepri I : Kota Tanjungpinang
2. Dapil Kepri II : Kabupaten Bintan-Lingga
3. Dapil Kepri III : Kabupaten Karimun
4. Dapil Kepri IV : Kota Batam (Bengkong)
5. Dapil Kepri V : Batu Aji (Sekupang)
6. Dapil Kepri VI : Nongsa Kabil
7. Dapil Kepri VII : Kabupaten Natuna

Kota Tanjungpinang yang merupakan ibu kota provinsi yang juga ditetapkan sebagai dapil Kepri I. Dengan jumlah penduduk kota Tanjungpinang data per tahun 2018 adalah 217.284 jiwa. Adapun dengan distribusi penduduk menurut kecamatan di kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Tanjungpinang Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)
1	Bukit Bestari	56.564
2	Tanjungpinang Timur	91.870
3	Tanjungpinang Kota	20.339
4	Tanjungpinang Barat	48.511
Total		217.284

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang, 2022 (telah diolah kembali)

Dari tabel 1.1 memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk di kota Tanjungpinang bermukim atau dipadati di kecamatan Tanjungpinang Timur dengan jumlah penduduk 91.870 orang. Lalu samakah jumlah penduduk tersebut dengan jumlah pemilih yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu serentak tahun 2019. Untuk itu jawabannya tentunya berbeda, untuk dapil Kepri I yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu lalu adalah sebanyak 160.355 pemilih. Lebih dari setengah jumlah penduduk di kota Tanjungpinang. Adapun dengan rincian 79.011 laki-laki dan 81.344 perempuan. Namun jumlah pemilih dengan pengguna hak pilih tidak sama, di mana jumlah pengguna hak pilih sebanyak 117.163 pemilih dengan rincian 56.163 laki-laki dan 61.000 perempuan (sumber data KPU Provinsi Kepulauan Riau).

Untuk dapil Kepri I, caleg dalam pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri memperebutkan 5 kursi dari total 45 kursi anggota DPRD Provinsi Kepri. Tentu dalam memperebutkan kursi tersebut, caleg harus memperoleh suara yang

banyak untuk dapat memenangkan pemilu. Guna memperoleh suara yang banyak dari para pemilih, perlu adanya strategi atau pergerakan untuk memenangkan pemilu. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan pengelolaan untuk mencapai suatu tujuan (Effendy, 2015). Perlu adanya strategi oleh caleg dalam mendapatkan dukungan dari khalayak atau pemilih. Untuk itu, strategi dikemas dalam strategi komunikasi politik yang mana strategi tersebut dapat digunakan para caleg dalam kampanye pemilu atau dalam meraup suara dari para pemilih.

Strategi komunikasi politik adalah sebuah taktik yang begitu berperan dalam kemenangan pemilu. Keberhasilan strategi komunikasi politik memberikan sebuah kontribusi yang besar dalam menggunakan dan merencanakan strategi kandidat atau partai politik untuk menyusun tidak hanya dalam menghadapi pemilu namun juga pasca pemilu (Amansyah, 2018). Dengan begitu perlunya strategi komunikasi politik yang digunakan oleh caleg dan tim kemenangan guna memperoleh suara hingga berhasil duduk di parlemen. Penggunaan strategi tidak hanya sewaktu menjelang pemilu atau sewaktu caleg mendaftarkan diri untuk mengikuti kontestasi politik saja. Namun juga dapat digunakan pasca pemilu dalam artian ialah bagaimana membangun *image* atau citra yang baik dan melekat di benak masyarakat. Hal inilah yang tentunya mempermudah pada pemilu selanjutnya jika mencalonkan kembali.

Berikut caleg yang terpilih dalam pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri dapil Kepri I kota Tanjungpinang, terdiri dari 5 orang dengan rincian 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.2 Calon Terpilih DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil Kepri I Kota Tanjungpinang Tahun 2019

No	Nama Calon Terpilih	Partai Politik	Perolehan Suara				Total
			Bukit Bestari	TPI Barat	TPI Kota	TPI Timur	
1	H. Lis Darmansyah, SH	PDI-P	4.494	3.915	1.256	7.202	16.867
2	H. Teddy Jun Askara, SE.,MM	Golkar	2.823	3.512	509	4.435	11.279
3	Bobby Jayanto	NasDem	2.381	1.896	1.087	1.841	7.205
4	Rudy Chua, SE.,MH	Hanura	2.038	2.288	1.669	1.225	7.220
5	Eis Aswati	Demokrat	1.688	1.673	912	4.931	9.204

Sumber: KPU Provinsi Kepulauan Riau, 2022 (telah diolah kembali)

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Lis Darmansyah memperoleh suara tertinggi dengan perolehan 16.867 suara. Jika dilihat dari 5 orang tersebut, 4 diantaranya merupakan politisi lama atau sebelumnya sudah memulai karier sebagai anggota DPRD baik tingkat kota maupun provinsi. Lis Darmansyah misalnya pernah menjadi ketua DPRD Kota Tanjungpinang periode 2002/2004, anggota DPRD Provinsi Kepri bahkan hingga menjadi Walikota Tanjungpinang

periode 2013-2018 berpasangan dengan Alm. H. Syahrul. Lalu ada Teddy Jun Askara yang menjadi anggota DPRD Provinsi Kepri periode 2014-2019 atau periode sebelumnya. Bobby Jayanto yang pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kota Tanjungpinang periode 2004-2009. Selanjutnya ada Rudy Chua yang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri sejak tahun 2004 hingga kini. Terpilih pada periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.

Keempat politisi tersebut merupakan wajah lama. Tentu dalam mempertahankan dukungan dari pemilih (masyarakat) adanya strategi yang digunakan seperti yang dibahas sebelumnya. Dalam penelitian ini, fokus membahas Rudy Chua yang menjadi caleg dan berhasil terpilih selama 4 periode atau hampir 20 tahun menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri. Politisi yang memulai karier politiknya dengan menjadi ketua DPC Partai Bhinneka Tunggal Ika periode 1998-2003. Partai Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu partai etnis Tionghoa di era reformasi. Namun pada pemilu 2004 tidak satupun partai etnis Tionghoa yang memenuhi syarat ikut serta dalam pemilu (Suryadinata, 2010).

Pada pemilu 2004, Rudy Chua maju sebagai caleg dalam pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri dari partai Patriot Pancasila. Di partai tersebut ia menjabat sebagai wakil ketua DPD periode 2003-2008. Pemilu selanjutnya pada tahun 2009, kembali mencalonkan diri sebagai caleg dengan dukungan dari Partai Perjuangan Indonesia Baru dan menjadi anggota partai sejak tahun 2008 hingga 2012. Setelah itu, pada pemilu selanjutnya yaitu tahun 2014 mencalonkan kembali namun dengan dukungan atau keikutsertaan partai yang

berbeda yaitu Partai Hati Nurani Rakyat atau disingkat Hanura. Karena ia menjadi kader di partai tersebut hingga saat ini.

Politisi yang berulang kali mencalonkan diri dan berulang kali terpilih dengan begitu memiliki *image* atau citra yang baik di masyarakat sewaktu menjabat sebagai anggota dewan. Dikatakan demikian karena berhasil mendapatkan dukungan dan mempertahankan dukungan dari masyarakat. Rudy Chua dikenal sebagai politisi yang fokusnya pada permasalahan kelistrikan dan air bersih (PDAM) yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat khususnya di dapilnya yaitu kota Tanjungpinang. Semasa menjabat sebagai anggota dewan, peran yang dimainkannya sebagai wakil rakyat ialah menampung aspirasi masyarakat kecil.

Contoh aspirasi dari masyarakat seperti mengusulkan dibuatnya program bantuan permodalan bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Bantuan yang diperuntukkan pada masyarakat kecil guna mengembangkan permodalan bagi pelaku UMKM, terdapat juga bantuan beasiswa yang mengutamakan pendidikan anak wajib belajar 12 tahun. Program yang dibuat karena banyak anak yang putus sekolah dikarenakan kekurangan biaya.

Fokus dan program-program tersebut yang mengantarkannya dikenal oleh masyarakat. Tak hanya dikalangan masyarakat (pemilih) saja, tetapi Rudy Chua juga memiliki program khusus untuk anak-anak panti asuhan yang mana mengadakan perjalanan muhibah ke daerah dalam negeri maupun luar negeri. Program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2012 dan terlaksana setiap tahunnya. Tujuan dari program ini adalah guna meningkatkan wawasan bagi

anak-anak panti asuhan. Dari keseluruhan program-program tersebut, itulah yang dijalankan Rudy Chua selama mengemban menjadi wakil rakyat. Selain itu, Rudy Chua juga aktif di beberapa organisasi sosial.

Rudy Chua adalah salah satu dari banyaknya penduduk di kota Tanjungpinang yang beretnis Tionghoa dan berkecimpung di dunia politik dan pemerintahan. Kedatangan etnis Tionghoa ke pulau Bintan tepatnya Tanjungpinang pertama kali terjadi pada tahun 1412 (Prasetyo & dkk, 2020). Terjadinya penyesuaian di mana keberadaan etnis Tionghoa menambah keberagaman tradisi di kota ini. Untuk itu, jauh sebelum Soeharto memperkenalkan kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa sudah terlebih dahulu etnis Tionghoa melebur dengan etnis di tanah Melayu ini.

Catatan sejarah mengenai orientasi politik etnis Tionghoa di Indonesia selalu mengalami perubahan sesuai dengan periodisasi kekuasaan politik di Indonesia (Suryadinata, 2010). Hal tersebut terlihat ketika kepemimpinan Soeharto, masyarakat etnis Tionghoa diperlakukan secara diskriminatif. Pada masa kepemimpinan Soeharto (1967-1998), perilaku diskriminasi terhadap masyarakat etnis Tionghoa terlihat begitu kuat dikarenakan kebijakan negara yang mendorong terjadinya asimilasi. Memerintahkan etnis Tionghoa untuk meninggalkan identitas budaya mereka namun pada waktu bersamaan pemerintah telah melakukan stigma sebagai etnis Tionghoa (Yudono, Situmeang, & Dwi Astuti, 2018). Masyarakat etnis Tionghoa tidak diperbolehkan bekerja di bidang militer, keamanan, dan politik sehingga membuat ruang gerak mereka terbatas.

Jelas disebutkan bahwasanya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa: segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dipertegas kembali dalam pasal 28 (d) menyatakan bahwa adanya hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Benar seperti yang dikatakan Leo Suryadinata seperti yang disebutkan di atas, orientasi politik etnis Tionghoa mengalami perubahan sesuai dengan periodisasi kekuasaan politik di Indonesia.

Di masa kepemimpinan SBY disahkannya UU Kewarganegaraan Nomor 12 tahun 2006. UU tersebut memberi gambaran mengenai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengakomodasi kepentingan legal identitas kewarganegaraan etnis Tionghoa. Hal ini menjadi salah satu dasar dari multikulturalisme dalam kehidupan demokrasi di Indonesia dengan memberikan keyakinan bahwa etnis Tionghoa mempunyai posisi yang sama dengan etnis-etnis lainnya yang ada di bumi Indonesia (Suryani & Azmy, 2020). Dari penjelasan sebelumnya memperlihatkan bahwa tidak ada lagi diskriminasi yang terjadi terhadap etnis apapun di Indonesia dan memberikan kebebasan pada semua WNI untuk dapat terjun ke dunia politik dan pemerintahan.

Kebebasan tersebut tentunya disambut baik seperti kesadaran masyarakat etnis Tionghoa di Kepri khususnya di kota Tanjungpinang pasca kejadian di masa lalu membuat mereka memiliki integritas yang tinggi terhadap etnisnya. *Trust* yang mereka ciptakan sangat tinggi dengan menguasai modal sosial baik di sektor ekonomi, politik, budaya dan pendidikan. Mereka beranggapan bahwa

era orde baru merupakan tembok imajinasi yang harus diruntuhkan di masa setelah reformasi ini.

Seperti yang diketahui bahwa Kepri didominasi dengan masyarakat beretnis Melayu. Masyarakat Melayu di Kepri terbuka dan menerima setiap etnis untuk hidup berdampingan dalam kehidupan sehari-hari (Kustiawan & Samin, 2020). Seperti di kota Tanjungpinang misalnya keterbukaan tersebut diperlihatkan dengan hidup berdampingan di berbagai sektor seperti ekonomi dan sosial dan lainnya, sehingga secara tidak langsung adanya pengakuan atas keberadaan etnis Tionghoa. Disebutkan sebelumnya kebebasan kepada siapa saja untuk turut serta aktif di bidang politik dan pemerintahan, hal tersebut diperlihatkan dalam ajang pemilu.

Terpilihnya caleg dengan etnis yang berbeda dari etnis mayoritas seperti halnya Rudy Chua. Ia berhasil memperoleh dukungan dari para pemilih sehingga menjadi anggota dewan kurang lebih selama 20 tahun lamanya. Selain itu, pada pemilu 2019 silam, ia tidak melakukan kampanye secara langsung. Artinya adalah tidak mengadakan pertemuan politik menemui masyarakat guna mengkampanyekan dirinya sebagai caleg untuk dipilih. Untuk itu, tentu adanya strategi atau langkah yang digunakan dalam memperoleh dan mempertahankan dukungan terhadap dirinya baik sewaktu pemilu maupun pasca pemilu.

Bagaimana komunikasi yang dibangun dengan masyarakat sehingga dirinya diterima dan diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri periode 2019-2024. Sebagaimana ia kini menjabat sebagai anggota komisi II bidang perekonomian dan keuangan. Oleh karena itu, dari

serangkaian penjelasan di atas maka ditarik kesimpulan untuk judul adalah **“Strategi Komunikasi Politik Rudy Chua Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Rudy Chua yang terpilih menjadi anggota dewan selama hampir 20 tahun atau 4 periode pemilihan. Terakhir terpilih pada pemilu 2019 silam, tidak melakukan kampanye secara langsung namun secara hasil terpilih menjadi anggota DPRD provinsi Kepri periode 2019-2024. Untuk itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah strategi komunikasi politik Rudy Chua dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah hal-hal yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui strategi komunikasi politik yang digunakan Rudy Chua dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 berdasarkan unsur-unsur komunikasi politik dan *marketing politic*.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan ilmiah serta perspektif baru dalam pemahaman komunikasi politik. Selain itu, penelitian ini juga dapat memajukan kajian ilmu pemerintahan yang terkait dengan aktor pemerintahan. Dalam hal ini DPRD Provinsi dipilih langsung oleh rakyat dalam kontestasi pemilihan umum. Dengan demikian mengacu pada strategi komunikasi politik aktor politik untuk memenangkan suara dalam pemilihan umum.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Untuk Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai media untuk mengungkapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. Mengenai teori-teori yang berlaku untuk mendukung penelitian.

b. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran, informasi dan data bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang komunikasi politik aktor politik dan *marketing politic*, khususnya strategi komunikasi politik bagi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

c. Untuk Calon Anggota Legislatif

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota kepada calon anggota legislatif yang ingin maju dalam pemilihan umum anggota legislatif. Selain itu, calon anggota legislatif juga dapat mempelajari dan menggunakan strategi komunikasi politik dalam proses memenangkan pemilihan umum anggota legislatif.

